

RELASI KEKUASAAN DALAM TUTURAN MASYARAKAT DESA

Herry Susanta¹, Rahmayanti²

STKIP Paris Barantai

herrysusanta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk relasi kekuasaan dalam tuturan masyarakat desa pada forum musyawarah desa serta mengungkap strategi wacana yang digunakan masyarakat dalam membangun, mempertahankan, dan menegosiasikan kepentingan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian berupa tuturan lisan masyarakat yang diperoleh melalui observasi partisipatif, perekaman, transkripsi, dan dokumentasi selama pelaksanaan musyawarah desa di Desa Manunggal Baru, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Analisis data menggunakan model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang meliputi dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam musyawarah desa direpresentasikan melalui pilihan leksikal, modalitas, bentuk kesantunan, dan strategi argumentasi yang digunakan peserta musyawarah. Tuturan masyarakat didominasi oleh bentuk usulan, persetujuan, kritik, penolakan, dan argumentasi yang disampaikan secara tidak langsung sebagai bentuk mitigasi untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial. Praktik wacana menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki posisi dominan dalam mengarahkan jalannya diskusi, sementara masyarakat menggunakan strategi bahasa yang santun untuk memperoleh legitimasi terhadap usulan yang disampaikan. Pada dimensi praktik sosial, penggunaan bahasa dipengaruhi oleh nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi musyawarah, gotong royong, penghormatan kepada tokoh masyarakat, dan pencapaian mufakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi media reproduksi, negosiasi, dan representasi relasi kekuasaan dalam praktik demokrasi partisipatif di tingkat desa.

Kata kunci: relasi kekuasaan; analisis wacana kritis; tuturan masyarakat; musyawarah desa

Abstract

This study aims to describe the power relations embedded in villagers' speech during village deliberation meetings and to examine the discourse strategies employed to construct, maintain, and negotiate social interests. This research employed a qualitative descriptive approach. The data consisted of villagers' spoken utterances collected through participant observation, audio recording, transcription, and documentation during village deliberation meetings in Manunggal Baru Village, Sungai Durian District, Kotabaru Regency, South Kalimantan. Data were analyzed using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis framework, encompassing three dimensions: text, discursive practice, and social practice. The findings reveal that power relations are reflected through lexical choices, modality, politeness strategies, and argumentative patterns used by participants. Villagers predominantly expressed proposals, agreements, criticisms, objections, and arguments indirectly as a mitigation strategy to preserve social harmony. Discursive practices indicate that village officials occupy a dominant position in directing discussions, whereas community members employ polite linguistic strategies to gain legitimacy for their proposals. At the level of social practice, language use is strongly influenced by local cultural values emphasizing deliberation, mutual cooperation, respect for community leaders, and consensus-building. The study concludes that

language functions not merely as a means of communication but also as a medium for reproducing, negotiating, and representing power relations within participatory democracy at the village level.

Keywords: *power relations; critical discourse analysis; community speech; village deliberation;*

Pendahuluan

Musyawarah desa merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berlandaskan prinsip demokrasi partisipatif. Forum ini menjadi ruang deliberatif yang mempertemukan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, serta berbagai unsur masyarakat lainnya untuk merumuskan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kehadiran musyawarah desa tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif dalam penyusunan kebijakan publik, tetapi juga sebagai media komunikasi sosial yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, negosiasi kepentingan, serta pembentukan konsensus bersama. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, kualitas musyawarah tidak hanya ditentukan oleh keputusan yang dihasilkan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi yang berlangsung selama proses diskusi (Habermas, 1996; Fairclough, 2020).

Bahasa menjadi instrumen utama dalam penyelenggaraan musyawarah desa karena seluruh proses penyampaian aspirasi, argumentasi, kritik, persetujuan, maupun penolakan diwujudkan melalui praktik berbahasa. Bahasa dalam konteks tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai alat penyampai informasi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang mencerminkan hubungan antarpeserta musyawarah. Menurut Halliday (2020), bahasa merupakan sistem semiotik sosial yang selalu berkaitan dengan konteks budaya dan situasi komunikasi. Oleh karena itu, setiap tuturan yang muncul dalam musyawarah desa tidak dapat dipahami hanya berdasarkan struktur kebahasaannya, tetapi juga harus dipahami melalui konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Dalam praktik komunikasi publik, tuturan masyarakat selalu dipengaruhi oleh posisi sosial, pengalaman, kepentingan, dan relasi kekuasaan yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Fairclough (2020) menegaskan bahwa bahasa merupakan praktik sosial yang tidak pernah bersifat netral karena selalu mengandung ideologi tertentu. Melalui pilihan kata, struktur kalimat, strategi argumentasi, maupun bentuk kesantunan, penutur membangun makna sekaligus merepresentasikan hubungan sosial yang terjadi dalam suatu komunitas. Dengan demikian, tuturan masyarakat dalam musyawarah desa sesungguhnya menjadi representasi dari dinamika sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat desa.

Dalam perspektif linguistik kritis, bahasa dipandang sebagai sarana pembentukan sekaligus reproduksi kekuasaan. Van Dijk (2021) menjelaskan bahwa wacana memiliki kemampuan untuk membangun pengetahuan, memengaruhi cara berpikir masyarakat, serta mempertahankan dominasi kelompok tertentu melalui praktik komunikasi. Artinya, siapa yang berbicara, bagaimana suatu pendapat disampaikan, dan siapa yang memperoleh kesempatan lebih besar untuk memengaruhi keputusan merupakan bagian dari praktik kekuasaan yang dapat diamati melalui analisis bahasa. Oleh sebab itu, musyawarah desa menjadi ruang yang sangat relevan untuk mengkaji hubungan antara bahasa dan kekuasaan.

Fenomena komunikasi dalam musyawarah desa menunjukkan bahwa masyarakat sering menggunakan strategi komunikasi yang berbeda ketika berhadapan dengan aparat desa, tokoh masyarakat, maupun peserta lain yang memiliki pengaruh lebih besar. Tidak semua warga menyampaikan pendapat secara langsung. Sebagian memilih menggunakan ungkapan tidak langsung, kalimat bersyarat, atau bentuk-bentuk mitigasi untuk menjaga hubungan sosial serta

menghindari konflik terbuka. Menurut Brown dan Levinson (2020), strategi kesantunan merupakan upaya penutur menjaga wajah (face) dirinya maupun lawan tutur agar komunikasi tetap berlangsung harmonis. Dalam masyarakat pedesaan yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan penghormatan terhadap tokoh masyarakat, strategi tersebut menjadi praktik komunikasi yang sangat dominan.

Penggunaan strategi bahasa yang santun bukan berarti menunjukkan kelemahan penutur, melainkan mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan pilihan bahasa dengan norma budaya yang berlaku. Leech (2021) menjelaskan bahwa prinsip kesantunan berfungsi menjaga keseimbangan hubungan sosial melalui penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang tidak mengancam mitra tutur. Dalam forum musyawarah desa, strategi tersebut tampak ketika masyarakat menyampaikan kritik melalui saran, pertanyaan, atau perumpamaan sehingga penolakan tidak disampaikan secara eksplisit. Bentuk komunikasi seperti ini menunjukkan bahwa praktik bahasa selalu berkaitan dengan strategi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Selain kesantunan, masyarakat juga menggunakan berbagai strategi wacana dalam menyampaikan kepentingannya. Gee (2020) menjelaskan bahwa wacana tidak hanya berupa penggunaan bahasa, tetapi juga mencakup cara seseorang membangun identitas, menunjukkan posisi sosial, dan memperoleh legitimasi dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, tuturan masyarakat dalam musyawarah desa sesungguhnya mencerminkan bagaimana warga membangun citra diri, memperoleh dukungan sosial, sekaligus mempertahankan kepentingannya melalui praktik komunikasi. Strategi tersebut dapat berupa penggunaan pengalaman pribadi, argumentasi kolektif, referensi terhadap norma adat, maupun legitimasi berdasarkan kepentingan masyarakat luas.

Lebih jauh, Angermuller (2020) menyatakan bahwa wacana merupakan praktik sosial yang menghasilkan dan mereproduksi struktur sosial melalui interaksi bahasa. Dalam konteks musyawarah desa, setiap tuturan tidak hanya mengandung makna linguistik, tetapi juga merepresentasikan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, antara kelompok dominan dan kelompok subordinat, maupun antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dengan demikian, analisis terhadap tuturan masyarakat memungkinkan peneliti mengungkap berbagai bentuk relasi kekuasaan yang tidak selalu tampak secara eksplisit.

Hubungan antara bahasa dan kekuasaan juga dijelaskan oleh Wodak dan Meyer (2022) yang menyatakan bahwa Analisis Wacana Kritis bertujuan mengungkap bagaimana praktik bahasa digunakan untuk mempertahankan maupun menantang dominasi sosial. Dalam berbagai forum publik, kekuasaan sering kali tidak diwujudkan melalui tindakan fisik, melainkan melalui kontrol terhadap komunikasi, penguasaan topik pembicaraan, legitimasi argumentasi, serta kesempatan berbicara. Oleh karena itu, studi mengenai tuturan masyarakat menjadi penting karena mampu memperlihatkan bagaimana proses demokrasi lokal berlangsung melalui praktik komunikasi sehari-hari.

Penelitian mengenai musyawarah desa selama ini lebih banyak dilakukan dari perspektif administrasi pemerintahan, partisipasi masyarakat, pembangunan desa, dan tata kelola pemerintahan. Kajian kebahasaan yang secara khusus menempatkan tuturan masyarakat sebagai objek utama penelitian masih relatif terbatas. Padahal, bahasa merupakan unsur utama yang membentuk seluruh proses musyawarah. Menurut Reisigl dan Wodak (2020), praktik komunikasi publik selalu dipengaruhi oleh ideologi, relasi sosial, serta kepentingan para aktor yang terlibat. Dengan demikian, analisis terhadap tuturan masyarakat tidak hanya memberikan gambaran mengenai bentuk bahasa yang digunakan, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana relasi kekuasaan diproduksi, dinegosiasikan, maupun dipertahankan melalui praktik komunikasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa musyawarah desa merupakan arena komunikasi yang kompleks karena mempertemukan berbagai aktor dengan latar belakang

sosial, kepentingan, dan tingkat kekuasaan yang berbeda. Kompleksitas tersebut menjadikan tuturan masyarakat sebagai objek kajian yang penting dalam pengembangan linguistik, khususnya Analisis Wacana Kritis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara bahasa, kekuasaan, ideologi, dan praktik demokrasi lokal dalam penyelenggaraan musyawarah desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam bentuk tuturan masyarakat serta strategi wacana yang digunakan dalam musyawarah desa berdasarkan konteks sosial, budaya, dan relasi kekuasaan yang melatarbelakanginya. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena bahasa sebagai praktik sosial melalui interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam tuturan masyarakat (Creswell & Poth, 2018).

Lokasi penelitian berada di Desa Manunggal Baru, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena desa tersebut secara rutin melaksanakan musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta warga desa. Kondisi tersebut memungkinkan diperolehnya data kebahasaan yang beragam sehingga relevan dengan tujuan penelitian.

Subjek penelitian adalah masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah desa, baik sebagai peserta aktif maupun peserta pasif yang terlibat dalam proses komunikasi selama berlangsungnya forum musyawarah. Adapun objek penelitian berupa tuturan masyarakat yang muncul dalam proses musyawarah desa, meliputi tuturan yang berisi pendapat, usulan, persetujuan, penolakan, sanggahan, kritik, maupun argumentasi yang berkaitan dengan agenda pembahasan.

Data penelitian berupa data verbal berbentuk tuturan lisan masyarakat yang diperoleh secara langsung pada saat pelaksanaan musyawarah desa. Sumber data berasal dari seluruh peserta musyawarah yang menyampaikan pendapat selama forum berlangsung. Untuk memperoleh data yang akurat, penelitian memanfaatkan data primer berupa hasil observasi lapangan, rekaman audio, transkripsi tuturan, serta catatan lapangan yang memuat konteks komunikasi, situasi interaksi, ekspresi nonverbal, dan respons peserta terhadap setiap tuturan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (human instrument) yang berperan dalam merencanakan penelitian, mengumpulkan data, melakukan observasi, mentranskripsikan data, menginterpretasikan makna, serta menarik kesimpulan penelitian. Untuk mendukung proses pengumpulan data digunakan instrumen pendukung berupa alat perekam digital, lembar observasi, buku catatan lapangan, pedoman transkripsi data, dan dokumentasi kegiatan musyawarah desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, observasi partisipatif, yaitu peneliti hadir secara langsung dalam kegiatan musyawarah desa untuk mengamati jalannya komunikasi, pola interaksi antarpeserta, serta situasi sosial yang melatarbelakangi munculnya tuturan. Kedua, teknik perekaman dilakukan menggunakan perangkat audio guna memperoleh data tuturan secara lengkap dan menghindari kehilangan informasi selama proses komunikasi berlangsung. Ketiga, seluruh hasil rekaman ditranskripsikan ke dalam bentuk teks dengan tetap mempertahankan struktur tuturan asli, termasuk jeda, penekanan, maupun intonasi yang memiliki makna pragmatis. Keempat, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa notulen rapat, agenda musyawarah, foto kegiatan, serta dokumen administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah desa.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, rekaman, transkripsi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang konsisten. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan tuturan yang disampaikan oleh berbagai peserta musyawarah, seperti aparat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga, sehingga interpretasi data menjadi lebih objektif. Selain itu, keabsahan data diperkuat melalui ketekunan pengamatan (*persistent observation*) dan pemeriksaan sejawat (*peer debriefing*) untuk meminimalkan subjektivitas peneliti.

Analisis data menggunakan model Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) Norman Fairclough yang terdiri atas tiga dimensi analisis, yaitu analisis teks (*text*), praktik wacana (*discursive practice*), dan praktik sosial (*social practice*) (Fairclough, 2013; Fairclough, 2020). Pada dimensi teks, analisis difokuskan pada aspek linguistik yang meliputi pilihan leksikal, struktur kalimat, modalitas, bentuk kesantunan, strategi mitigasi, penggunaan metafora, dan pola argumentasi yang muncul dalam tuturan masyarakat. Pada dimensi praktik wacana, analisis diarahkan pada proses produksi, penyampaian, distribusi, dan interpretasi tuturan selama berlangsungnya musyawarah desa, termasuk hubungan antarpeserta dalam membangun makna bersama. Selanjutnya, pada dimensi praktik sosial, analisis dilakukan untuk mengungkap hubungan antara tuturan masyarakat dengan konteks sosial yang lebih luas, seperti relasi kekuasaan, ideologi, budaya lokal, struktur sosial, dan praktik demokrasi partisipatif yang berkembang dalam masyarakat desa.

Tahapan analisis data dimulai dengan reduksi data melalui proses seleksi terhadap seluruh tuturan yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan proses pengodean (*coding*) berdasarkan kategori bentuk tuturan, fungsi komunikasi, dan strategi wacana. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan tiga dimensi Analisis Wacana Kritis Fairclough sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara penggunaan bahasa, praktik komunikasi, dan relasi kekuasaan dalam musyawarah desa. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif dengan mengaitkan temuan penelitian pada teori-teori Analisis Wacana Kritis, pragmatik, dan sosiolinguistik sehingga menghasilkan kesimpulan yang mampu menjelaskan dinamika komunikasi masyarakat dalam forum musyawarah desa secara utuh.

Hasil

Analisis Teks

Analisis teks merupakan dimensi pertama dalam Analisis Wacana Kritis Fairclough yang berfokus pada karakteristik linguistik suatu tuturan. Pada dimensi ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana pilihan kosakata, struktur kalimat, modalitas, bentuk kesantunan, serta strategi argumentasi digunakan oleh masyarakat dalam forum musyawarah desa. Bahasa dipandang bukan sekadar alat komunikasi, melainkan sebagai praktik sosial yang merepresentasikan kepentingan, ideologi, dan hubungan kekuasaan antarpeserta musyawarah.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan musyawarah desa, ditemukan bahwa tuturan masyarakat memperlihatkan kecenderungan menggunakan bahasa yang santun, argumentatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Sebagian besar peserta menghindari penggunaan tuturan yang bersifat konfrontatif meskipun sedang menyampaikan kritik terhadap usulan maupun kebijakan pemerintah desa. Pilihan bahasa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran terhadap norma komunikasi yang berlaku dalam kehidupan sosial pedesaan.

Secara umum, tuturan masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk utama sebagai berikut.

Tuturan Usulan

Tuturan usulan merupakan bentuk tuturan yang paling dominan selama musyawarah desa. Bentuk ini digunakan masyarakat ketika menyampaikan gagasan mengenai pembangunan desa, pengelolaan dana desa, maupun penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Secara linguistik, tuturan usulan ditandai oleh penggunaan modalitas seperti *sebaiknya*, *perlu*, *kiranya*, *mungkin*, dan *hendaknya*. Penggunaan modalitas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak memaksakan kehendak, tetapi membuka ruang bagi peserta lain untuk memberikan pertimbangan.

Pilihan leksikal tersebut mencerminkan adanya strategi mitigasi yang bertujuan menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dengan pemerintah desa. Dalam perspektif Fairclough, penggunaan modalitas merupakan bagian dari praktik linguistik yang menunjukkan posisi penutur terhadap informasi yang disampaikan.

Tuturan Persetujuan

Bentuk tuturan berikutnya ialah tuturan persetujuan. Tuturan ini muncul ketika masyarakat menyatakan dukungan terhadap program pembangunan maupun pendapat peserta lain.

Tuturan persetujuan umumnya menggunakan ungkapan seperti *kami setuju*, *kami mendukung*, *pendapat tersebut sudah tepat*, atau *hal itu memang menjadi kebutuhan masyarakat*. Pilihan kosakata tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berusaha membangun solidaritas dalam forum musyawarah.

Selain menggunakan bentuk persetujuan secara langsung, masyarakat juga menyampaikan persetujuan melalui penguatan argumentasi peserta sebelumnya. Strategi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam musyawarah desa berlangsung secara kooperatif sehingga keputusan yang dihasilkan lebih mudah mencapai mufakat.

Tuturan Kritik

Analisis menunjukkan bahwa kritik jarang disampaikan secara eksplisit. Kritik lebih banyak dikemas melalui bentuk pertanyaan, saran, maupun penyampaian pengalaman masyarakat.

Penggunaan kalimat seperti *mungkin pelaksanaannya masih perlu diperbaiki*, *apakah anggaran tersebut sudah sesuai kebutuhan masyarakat*, atau *barangkali ada alternatif lain yang lebih efektif* menunjukkan bahwa masyarakat menghindari penggunaan bahasa yang berpotensi menimbulkan konflik.

Strategi tersebut memperlihatkan bahwa kritik dalam musyawarah desa lebih bersifat konstruktif daripada konfrontatif. Pilihan bahasa demikian merupakan bentuk kesantunan yang dipengaruhi oleh budaya lokal yang menempatkan penghormatan terhadap aparat desa sebagai nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Tuturan Penolakan

Tuturan penolakan juga ditemukan dalam proses musyawarah, meskipun jumlahnya relatif sedikit dibandingkan bentuk tuturan lainnya.

Penolakan tidak disampaikan melalui ungkapan yang bersifat langsung seperti *kami menolak* atau *usulan itu salah*, melainkan menggunakan bentuk-bentuk tidak langsung seperti *perlu dipertimbangkan kembali*, *masih ada beberapa hal yang perlu dikaji*, atau *mungkin usulan tersebut dapat dijadwalkan pada tahun berikutnya*.

Pilihan bahasa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tetap berusaha menjaga hubungan interpersonal meskipun memiliki pandangan yang berbeda.

Tuturan Argumentatif

Tuturan argumentatif digunakan masyarakat ketika memberikan alasan terhadap usulan maupun pendapat yang disampaikan.

Argumentasi umumnya dibangun melalui pengalaman masyarakat, kondisi lapangan, kebutuhan pembangunan desa, maupun kepentingan bersama.

Penggunaan data empiris berupa pengalaman sehari-hari memberikan legitimasi terhadap pendapat masyarakat sehingga usulan yang disampaikan memperoleh dukungan dari peserta lain.

Pilihan Leksikal

Analisis terhadap pilihan kosakata menunjukkan dominasi penggunaan kata-kata yang berorientasi kolektif, seperti *kita*, *masyarakat*, *bersama*, *kepentingan desa*, *gotong royong*, dan *musyawarah*. Sebaliknya, penggunaan pronomina *saya* relatif lebih sedikit.

Dominasi pronomina kolektif menunjukkan bahwa masyarakat membangun identitas bersama dalam forum musyawarah. Hal ini memperlihatkan bahwa orientasi komunikasi lebih diarahkan pada kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan individu.

Modalitas

Modalitas yang ditemukan didominasi oleh kata-kata seperti *mungkin*, *kiranya*, *perlu*, *hendaknya*, *sebaiknya*, dan *diharapkan*.

Penggunaan modalitas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak menggunakan bahasa yang bersifat memaksa. Sebaliknya, mereka memberikan ruang kepada peserta lain untuk mempertimbangkan usulan yang disampaikan.

Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Fairclough, modalitas mencerminkan hubungan sosial antara penutur dengan lawan tutur. Semakin tinggi posisi sosial seseorang, kecenderungan penggunaan modalitas menjadi semakin rendah karena penutur memiliki legitimasi untuk menyampaikan perintah secara langsung. Sebaliknya, masyarakat sebagai peserta musyawarah lebih banyak menggunakan modalitas sebagai strategi menjaga keseimbangan hubungan sosial.

Kesantunan Berbahasa

Kesantunan merupakan karakteristik yang paling menonjol dalam tuturan masyarakat selama musyawarah desa.

Bentuk kesantunan tampak melalui penggunaan sapaan penghormatan kepada kepala desa, ketua BPD, tokoh masyarakat, maupun peserta lain. Selain itu, masyarakat lebih memilih menggunakan kalimat permohonan, saran, dan pertimbangan daripada bentuk imperatif.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal masih memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap praktik komunikasi masyarakat. Bahasa digunakan bukan hanya sebagai alat menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana mempertahankan keharmonisan hubungan sosial.

Secara keseluruhan, analisis dimensi teks menunjukkan bahwa tuturan masyarakat dalam musyawarah desa dibangun melalui pilihan kosakata yang santun, penggunaan modalitas yang bersifat mitigatif, argumentasi berbasis kepentingan bersama, serta strategi komunikasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik bahasa dalam musyawarah desa bukan sekadar proses pertukaran informasi, melainkan juga menjadi media representasi nilai-nilai budaya, relasi sosial, dan distribusi kekuasaan dalam kehidupan masyarakat desa.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam tuturan masyarakat desa tidak hanya tampak melalui siapa yang memiliki kesempatan berbicara, tetapi juga tercermin dalam pilihan bahasa, strategi penyampaian pendapat, dan pola interaksi yang berkembang selama musyawarah desa. Berdasarkan analisis menggunakan model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, ditemukan bahwa pada dimensi teks masyarakat cenderung menggunakan pilihan leksikal yang santun, modalitas yang bersifat mitigatif, serta argumentasi yang berorientasi pada kepentingan bersama. Strategi tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga keharmonisan sosial sekaligus menyampaikan aspirasi secara efektif. Pada dimensi praktik wacana, proses produksi dan penyampaian tuturan memperlihatkan bahwa pemerintah desa dan tokoh masyarakat memiliki posisi yang lebih dominan dalam mengendalikan jalannya diskusi. Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat melalui strategi komunikasi yang mengedepankan kesantunan, argumentasi, dan negosiasi sehingga proses musyawarah tetap berlangsung secara demokratis. Sementara itu, pada dimensi praktik sosial, penggunaan bahasa dipengaruhi oleh budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap pemimpin, dan pencapaian mufakat. Nilai-nilai tersebut membentuk pola komunikasi yang cenderung menghindari konflik terbuka dan lebih mengutamakan konsensus. Dengan demikian, bahasa dalam musyawarah desa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang merepresentasikan ideologi, budaya, serta relasi kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Analisis Wacana Kritis, khususnya dalam memahami praktik komunikasi masyarakat pada forum demokrasi lokal. Selain itu, temuan penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam membangun komunikasi partisipatif yang lebih inklusif, dialogis, dan berkeadilan sehingga seluruh elemen masyarakat memperoleh kesempatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

- Angermuller, J. (2020). *Analysis of ideological discourse*. Routledge.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (2020). *Politeness: Some universals in language usage* (Reissued ed.). Cambridge University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.
- Fairclough, N. (2020). *Language and power* (3rd ed.). Routledge.
- Gee, J. P. (2020). *How to do discourse analysis: A toolkit* (3rd ed.). Routledge.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. M. I. M. (2014). *Halliday's introduction to functional grammar* (4th ed.). Routledge.
- Leech, G. (2021). *The pragmatics of politeness*. Oxford University Press.
- Reisigl, M., & Wodak, R. (2020). *The discourse-historical approach*. Dalam R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Methods of Critical Discourse Studies* (4th ed.). Sage.
- van Dijk, T. A. (2021). *Discourse and power* (2nd ed.). Bloomsbury.
- Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2022). *Methods of Critical Discourse Studies* (4th ed.). Sage.